



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

POHON KINERJA

***DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***

**SAKIP
2023**



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

POHON KINERJA

Singaraja, 2 Januari 2023

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;**



VI N^o 1234 Riang Pustaka, S.IP

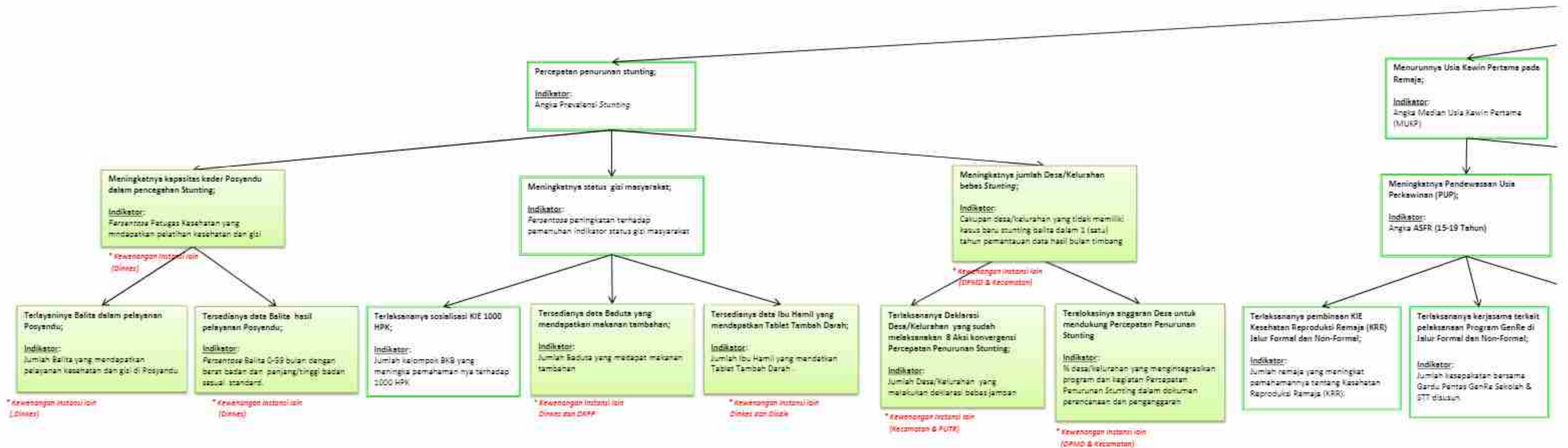
ambina Tk.I (IV/b)

19750218 199311 1 001

POHON KINERJA :

* URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

* URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;



Meningkatnya Detrajat Kesehatan Masyarakat;
Umur Harapan Hidup (UHP)

Meningkatnya Kapasitas Program Bengga Kencana di wilayah Sasaran Khusus;
Indikator:
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Meningkatnya kerjasama stakeholder dalam pembinaan ketahanan keluarga;
Indikator:
Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBG)

Meningkatnya komitmen Stakeholder dalam pelaksanaan Program KKBP;
Indikator:
% Kampung KB di Desa/Kelurahan Nantong Kamaliman

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan;
Indikator:
Cakupan informasi data micro keluarga di setiap desa/kelurahan

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBP;
Indikator:
% PUS Peserta KB

Terlaksananya pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) BKR;
Indikator:
Jumlah kelompok kegiatan (Poktan) BKR yang aktif

Terlaksananya kerjasama stakeholder Desa/Kelurahan;
Indikator:
Jumlah Kesepakatan Bersama Instansi Masyarakat Pedesaan dan Kader tersusun

Terlaksananya pembinaan penyuluhan KB/KR yang mandiri;
Indikator:
Jumlah PKB/PUS dan IMP yang mampu melaksanakan penyuluhan KB mandiri

Terlaksananya Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk;
Indikator:
Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Program Pengendalian Penduduk

Terlaksananya pembinaan Program KKBP di Kampung KB;
Indikator:
Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Program KKBP di Kampung KB

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan pada semua sektor;
Indikator:
Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Tersedianya Data Kependudukan;
Indikator:
Jumlah dokumen Grand Data Kependudukan tersusun

Terpublikasinya informasi keluarga;
Indikator:
Jumlah data kampung KB yang berinput dalam SIGA

Tersedianya data dan informasi capaian target;
Indikator:
1. Jumlah data Kajian Pencapaian Target ditetapkan;
2. Jumlah dokumen Pencatatan dan Pelaporan PKB/PLKB disusun;
3. Jumlah laporan DALLAP & PELAKON KB direkap

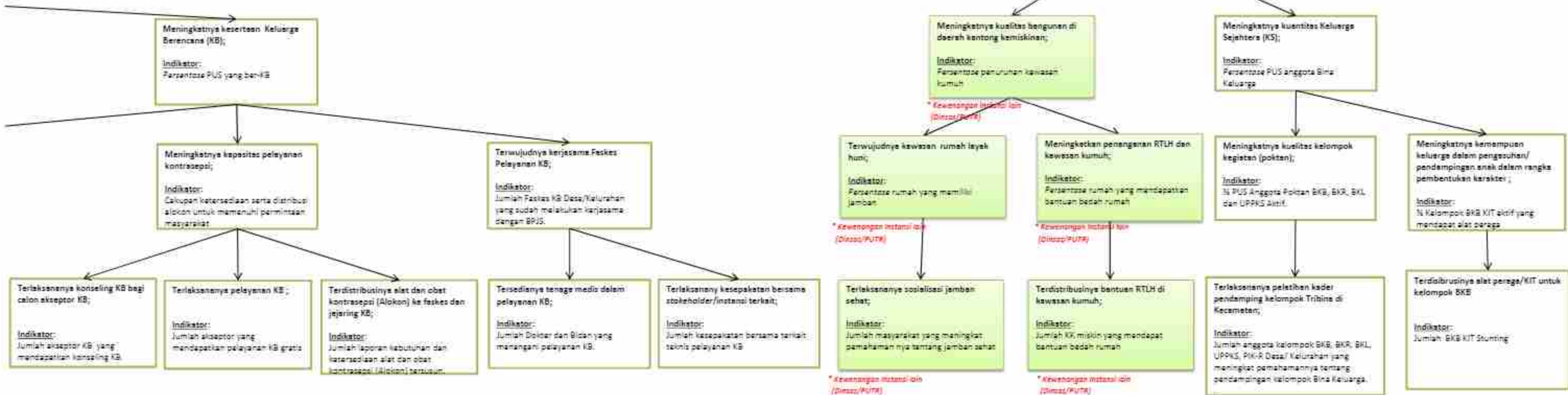
Terlaksananya sosialisasi/KE Program KKBP;
Indikator:
Jumlah PUS yang meningkat pemahamannya terhadap Program KKBP

Misi ke-1 :
Mewujudkan masyarakat Buileng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan **pelayanan kesehatan yang berkualitas** untuk semua warga masyarakat!

Misi ke-3 :
Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, **mendorong pengarusutamaan gender**, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah!

Menurunnya penduduk Miskin;

INDIKATOR:
Persentase Penurunan Penduduk Miskin



Membantu Kepala Daerah untuk mewujudkan
Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga
Berkualitas;

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk serta Terwujudnya Keluarga
Bahagia dan Sejahtera;

Indikator:

Penduduk Tumbuh Seimbang

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Meningkatnya Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak;

Indikator:
Jumlah kasus kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak;

Menurunnya kasus kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak termasuk Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Indikator:
% Perempuan dan Anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan pendampingan;

Terwujudnya Peraturan Daerah terkait
Perlindungan Anak;

Indikator:
Jumlah PERDA Perlindungan Anak
ditetapkan;

Meningkatnya Penerapan Indikator
Penilaian KLA di masing-masing SKPD;

Indikator:
% SKPD yang menerapkan indikator
penilaian KLA;

Terwujudnya Peraturan Daerah terkait
Pemeruhan Hak Anak;

Indikator:
Jumlah kebijakan Pemeruhan Hak Anak;

Tersedianya Data terpisah;

Indikator:
Jumlah Dokumen Profil
Perempuan dan Anak tersusun;

Tersedianya layanan pendampingan
korban kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak;

Indikator:
Jumlah lembaga layanan pengaduan
kasus kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak;

Terlaksananya Sosialisasi Gugus
Tugas Trafficking;

Indikator:
Jumlah siswa-siswi, masyarakat
yang meningkat pemahamannya
tentang gugus tugas Trafficking;

Tersedianya Kajian Ranperda
Perlindungan Anak;

Indikator:
Jumlah kajian Ranperda Perlindungan
Anak tersusun;

Terlaksananya PERDA
Perlindungan Anak;

Indikator:
Jumlah kegiatan yang mengacu
pada PERDA Perlindungan Anak;

Terlaksananya pembinaan
PATBM Desa/Kelurahan;

Indikator:
Jumlah Satgas PATBM Desa/
Kelurahan yang dibentuk;

Tersedianya Sekolah Ramah
Anak;

Indikator:
Jumlah Sekolah Ramah Anak;

Tersedianya Ruang Terbuka
Hijau Ramah Anak;

Indikator:
Jumlah Ruang Terbuka Hijau
Ramah Anak;

Tersedianya Puskesmas Ramah
Anak;

Indikator:
Jumlah Puskesmas Ramah Anak;

* Kewenangan Instansi lain
(Dikabkorpri)

* Kewenangan Instansi lain
(Dikabkorpri)

* Kewenangan Instansi lain
(Dinas)

Masih Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Masih Rendahnya Kualitas Keluarga

Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
INDIKATOR:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;
Indikator:
% usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan.

Meningkatnya Jejering Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
Indikator:
% Jejering Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan.

Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak;
Indikator:
Jumlah PERDA KLA ditetapkan.

Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
Indikator:
% kelompok Perempuan Aktif dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif.

Terwujudnya kerjasama Kelompok Perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
Indikator:
Jumlah Kerjasama kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif.

Meningkatnya Jejering Kelembagaan PUG yang berkualitas;
Indikator:
% Jejering Pengarusutamaan Gender yang Aktif.

Tersedianya Kajian Ranperda Pemenuhan Hak Anak;
Indikator:
Jumlah kajian PERDA KLA tersusun.

Terlaksananya PERDA Pemenuhan Hak Anak;
Indikator:
Jumlah Kegiatan yang mengacu pada PERDA KLA.

Terlaksananya pembinaan kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif;
Indikator:
Jumlah Kelompok Perempuan yang meningkatkan pemahamannya tentang bidang usaha ekonomi produktif.

Tersedianya ekos Permodalan kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif;
Indikator:
Jumlah pelaku usaha yang bermodal.

* Kewenangan Instansi asal (DPSA Provinsi, Diskop UKM, Asetnasas lainnya)

Tersedianya kelompok Perempuan dalam bidang ekonomi Produktif;
Indikator:
Jumlah Home Industri Desa/Kelurahan yang melibatkan Kelompok Perempuan.

Terlaksananya kerjasama pelaku usaha dalam pembinaan Usaha Ekonomi Produktif;
Indikator:
Jumlah pelaku usaha yang melakukan kesepakatan bersama dalam pembinaan UEP.

Tersedianya Data Gender pada instansi Pemerintah dan Swasta;
Indikator:
Jumlah Dokumen Statistik Gender terdapat.

Terlaksananya pembinaan Kelembagaan gugus tugas PUG Desa/Kelurahan;
Indikator:
Jumlah jejering yang meningkatkan pengetahuannya terhadap kelembagaan gugus tugas PUG.

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Perempuan) yang Berkeadilan Gender;
Indikator:
Angka Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)

Terwujudnya Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG);
Indikator:
Jumlah PERDA PUG ditetapkan.

Meningkatnya kualitas hidup keluarga;
Indikator:
% desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga

Meningkatnya derajat Kesehatan Perempuan;
Indikator:
% Posyandu Aktif

Meningkatnya akses pelayanan Pendidikan;
Indikator:
% Rata-rata Lama Sekolah Perempuan
** kewenangan instansi lain (Disdikpora)*

Meningkatnya derajat Ekonomi Perempuan;
Indikator:
% Sumbangan Pendapatan ekonomi Perempuan
** kewenangan instansi lain (Disnaker)*

Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan yang responsif gender pada SKPD;
Indikator:
Jumlah focal point yang meningkat pemahamannya tentang PRAG

Tersedianya Kajian PERDA PUG;
Indikator:
Jumlah Kajian PERDA PUG tersusun.

Terlaksananya PERDA PUG;
Indikator:
Jumlah Kegiatan yang mengacu pada PERDA PUG.

Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas keluarga di Desa/Kelurahan
Indikator:
Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan GSB

Tersedianya data kelompok perempuan aktif dalam peningkatan UPPKS;
Indikator:
Jumlah kelompok UPPKS Perempuan aktif di Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Indikator:
Jumlah kelompok BKB Aktif

Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Gizi Ibu Hamil;
Indikator:
Jumlah Sosialisasi peningkatan Gizi Ibu Hamil
** kewenangan instansi lain (Dinas)*

TABEL POHON KINERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Detrajat Kesehatan Masyarakat;	Umur Harapan Hidup (UHP)	Jumlah Umur orang meninggal dibagi jumlah orang meninggal	Kewenangan Dinas Kesehatan
1.1.	<i>Percepatan penurunan stunting;</i>	<i>Angka Prevalensi Stunting</i>	<i>Angka Prevalensi Stunting</i>	<i>Kewenangan Dinas Kesehatan</i>
1.1.1	Meningkatnya kapasitas kader Posyandu dalam pencegahan Stunting;	<i>Persentase</i> Petugas Kesehatan yang mendapatkan pelatihan kesehatan dan gizi	Jumlah petugas kesehatan yang mendapat pelatihan kesehatan dan gizi dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan
1.1.1.1	Terlayannya Balita dalam pelayanan Posyandu;	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi di Posyandu.	Jumlah Balita yang hadir dalam pelayanan posyandu dibagi jumlah balita yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan
1.1.1.2	Tersedianya data Balita hasil pelayanan Posyandu;	<i>Persentase</i> Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard.	Jumlah balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar dibagi jumlah balita 0-59 tahun yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan
1.1.2	Meningkatnya status gizi masyarakat;	<i>Persentase</i> peningkatan terhadap pemenuhan indikator status gizi masyarakat	Jumlah indikator status gizi masyarakat yang mengalami peningkatan dibagi jumlah indikator status gizi yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan
1.1.2.1	Terlaksananya sosialisasi KIE 1000 HPK;	Jumlah kelompok BKB yang meningkatkan pemahamannya terhadap 1000 HPK	Jumlah kelompok BKB yang hadir dalam sosialisasi KIE 1000 HPK dibagi jumlah kelompok BKB yang ada x 100	Kewenangan DP2KB3A
1.1.2.2	Tersedianya data Baduta yang mendapatkan makanan tambahan	Jumlah Baduta yang mendapat makanan tambahan	Jumlah baduta yang mendapatkan PMT dibagi jumlah baduta yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan dan Dinsos
1.1.2.3	Tersedianya data Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah;	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan TTD dibagi jumlah ibu hamil yang ada x 100	Kewenangan Dinas Kesehatan dan Disdikpora
1.1.3	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan bebas Stunting;	Cakupan desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus baru stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data hasil bulan timbang	Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak memiliki kasus baru stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data hasil bulan timbang dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100	Kewenangan DPMD dan Kecamatan
1.1.3.1	Terlaksananya Deklarasi Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan 8 Aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan deklarasi bebas jamban	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan deklarasi bebas jamban dibagi jumlah Desa/Kelurahan yang ada x 100	Kewenangan PUTR dan Kecamatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1.3.2	Teralokasinya anggaran Desa untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	% desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada x 100	Kewenangan DPMD dan Kecamatan
1.2	Menurunnya Usia Kawin Pertama pada Remaja;	Angka Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Angka Median Usia Kawin Pertama	BKKBN Provinsi
1.2.1	Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);	Angka ASFR (15-19 Tahun)	Angka Kelahiran pada Remaja Umur 15 - 19 Tahun	BKKBN Provinsi
1.2.1.1.	Terlaksananya pembinaan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Jalur Formal dan Non-Formal;	Jumlah remaja yang meningkat pemahamannya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).	Data Bulanan kegiatan PIK R	Laporan Bulanan
1.2.1.2.	Terlaksananya kerjasama terkait pelaksanaan Program GenRe di Jalur Formal dan Non-Formal;	Jumlah kesepakatan bersama Gardu Pentas GenRe Sekolah & STT disusun.	Data SK GenRe	Dokumen SK
1.2.1.3.	Terlaksananya pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan) BKR;	Jumlah kelompok kegiatan (Poktan) BKR yang aktif	Data kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga remaja/BKR aktif	Laporan Bulanan
1.2.2	Meningkatnya kerjasama stakeholders dalam pembinaan ketahanan keluarga;	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD).	Jumlah PPKBD dibagi jumlah Desa/Kelurahan	Laporan Bulanan
1.2.2.1	Terlaksananya kerjasama stakeholders Desa/Kelurahan;	Jumlah Kesepakatan Bersama Institusi Masyarakat Pedesaan dan Kader tersusun.	Data SK Institusi Masyarakat Pedesaan dan Kader	Dokumen SK
1.1.2.2	Terlaksananya pembinaan penyuluhan KB/KR yang mandiri;	Jumlah PKB/PLKB dan IMP yang mampu melaksanakan penyuluhan KB mandiri.	Data peserta pembinaan PKB/PLKB	Laporan Bulanan
1.3.	Meningkatnya Kapasitas Program Bangga Kencana di wilayah Sasaran Khusus;	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);	Data IPBK Provinsi	BKKBN Provinsi
1.3.1	Meningkatnya komitmen Stakeholder dalam pelaksanaan Program KKBPk;	% Kampung KB Desa/Kelurahan Kantong Kemiskinan.	Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai Kampung KB dibagi jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng dikali seratus persen.	Laporan Bulanan
1.3.1.1	Terlaksananya Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk;	Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Program Pengendalian Penduduk.	Data Kader di Kampung KB yang menjadi peserta sosialisasi Program Pengendalian Penduduk	Laporan Bulanan Bidang Daiduk
1.3.1.2	Terlaksananya Pembinaan pendidikan kependudukan di Kampung KB;	Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Pendidikan Kependudukan di Kampung KB.	Data kader yang menjadi peserta sosialisasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Laporan Bulanan Bidang Daiduk

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.3.1.3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan pada semua sektor;	Jumlah kader KB yang meningkat pemahamannya tentang Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan.	Data kader KB yang menjadi peserta sosialisasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan.	Laporan Bulanan Bidang Dalduk
1.3.2	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan;	Cakupan informasi data <i>micro</i> keluarga di setiap desa/kelurahan	Data <i>micro</i> keluarga PKB/PLKB Kecamatan	Laporan Bulanan
1.3.2.1	Tersedianya Data Kependudukan;	Jumlah dokumen Grand Disign Kependudukan tersusun	Dokumen/Buku Grand Design Kependudukan	Dokumen
1.3.2.2	Terpublikasinya informasi keluarga;	Jumlah data kampung KB yang terinput dalam SIGA		
1.4	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana (KB);	Persentase PUS yang ber-KB	Jumlah PUS ber-KB dibagi Jumlah PUS dikali seratus Persen	Laporan Bulanan KB
1.4.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK;	% PUS Peserta KB Baru	Jumlah PUS peserta KB Baru dibagi Jumlah PUS yang ada dikali seratus-persen	Laporan Bulanan KB
1.4.1.1	Tersedianya data dan informasi capaian target;	- Jumlah data Kajian Pencapaian Target ditetapkan;	Data Target Bulanan dan Tahunan Sasaran komitmen kerja	Dokumen Komitmen sasaran kerja BKKBN
		- Jumlah dokumen Pencatatan dan Pelaporan PKB/PLKB disusun;	Data pelaporan kinerja PKB/PLKB	Dokumen Laporan PKB/PLKB
		- Jumlah laporan DALLAP & PELKON KB direkap;	Laporan pengendalian lapangan dan pelaporan kontrasepsi	Laporan DALLAP & PELKON
1.4.1.2	Terlaksananya sosialisasi/KIE Program KKBPK;	Jumlah PUS yang meningkat pemahamannya terhadap Program KKBPK.	Jumlah PUS yang hadir dalam sosialisasi/KIE Program KKBPK dibagi jumlah PUS yang ada x 100	Laporan pembinaan PUS
1.4.2	Meningkatnya kapasitas pelayanan kontrasepsi;	Cakupan ketersediaan serta distribusi alokon untuk memenuhi permintaan masyarakat	Jumlah stok opname alat dan obat kontrasepsi	Laporan gudang alokon
1.4.2.1	Terlaksananya konseling KB bagi calon akseptor KB;	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan konseling KB.	Jumlah akseptor KB yang mendapat konseling KB dibagi jumlah akseptor KB yang ada x 100	Laporan konseling KB
1.4.2.2	Terlaksananya pelayanan KB ;	Jumlah akseptor yang mendapatkan pelayanan KB gratis	Jumlah laporan pelayanan KB	Laporan Bulanan pelayanan KB
1.4.2.3	Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi (Alokon) ke faskes dan jejaring KB;	Jumlah laporan kebutuhan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) tersusun.	Jumlah amprahan kebutuhan alokon faskes dan jejaring KB	Laporan permintaan alokon
1.4.3	Terwujudnya kerjasama Faskes Pelayanan KB;	Jumlah Faskes KB Desa/Kelurahan yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS.	Jumlah Faskes KB Desa/Kelurahan yang sudah melakukan kerjasama dengan BPJS dibagi jumlah faskes KB yang ada di Desa/Kelurahan x 100	Laporan Faskes

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.4.3.1	Tersedianya tenaga medis dalam pelayanan KB;	Jumlah Dokter dan Bidan yang menangani pelayanan KB.	Data Dokter dan Bidan yang melayani KB	Dokumen
1.4.3.2	Terlaksananya kesepakatan bersama stakeholder/instansi terkait;	Jumlah kesepakatan bersama terkait teknis pelayanan KB	MoU kerjasama pelayanan KB	Dokumen
2	Menurunnya penduduk Miskin;	<i>Persentase Penurunan Penduduk Miskin</i>	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan	Data BPS
2.1	<i>Meningkatnya kualitas bangunan di daerah kantong kemiskinan;</i>	<i>Persentase penurunan kawasan kumuh</i>	<i>Jumlah penurunan kawasan kumuh dibagi jumlah kawasan kumuh yang ada x 100</i>	Data BPS
2.1.1	Terwujudnya kawasan rumah layak huni;	<i>Persentase rumah yang memiliki jamban</i>	Jumlah rumah yang memiliki jamban dibagi jumlah rumah yang ada x 100	Kewenangan Kecamatan & Dinas PUTR
2.1.1.1	Terlaksananya sosialisasi jamban sehat;	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang jamban sehat	Jumlah masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tentang jamban sehat dibagi total masyarakat yang ada x 100	Kewenangan Kecamatan & Dinas PUTR
2.2	<i>Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh;</i>	<i>Persentase rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah</i>	<i>Jumlah rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah dibagi jumlah rumah yang terdata x 100</i>	<i>Kewenangan Kecamatan & Dinas PUTR & Disperkimta</i>
2.2.1.1	Terdistribusinya bantuan RTLH di kawasan kumuh;	Jumlah KK miskin yang mendapat bantuan bedah rumah	Data KK Miskin yang mendapat bantuan bedah rumah	Dokumen
2.2	Meningkatnya kuantitas Keluarga Sejahtera (KS);	<i>Persentase PUS anggota Bina Keluarga</i>	Jumlah PUS anggota Bina keluarga yang aktif dibagi jumlah PUS yang ada x 100	Laporan Bulanan
2.2.1	Meningkatnya kualitas kelompok kegiatan (poktan);	% PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif.	Jumlah PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS Aktif dibagi jumlah kelompok yang ada x 100	Laporan poktan
2.2.1.1	Terlaksananya pelatihan kader pendamping kelompok Tribina di Kecamatan;	Jumlah anggota kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R Desa/ Kelurahan yang meningkat pemahamannya tentang pendampingan kelompok Bina Keluarga.	Data kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R Desa/ Kelurahan yang hadir dalam pendampingan kelompok Bina Keluarga	Laporan kegiatan pendampingan
2.2.2	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan/ pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter ;	% Kelompok BKB KIT aktif yang mendapat alat peraga	Jumlah Kelompok BKB KIT aktif yang mendapat alat peraga dibagi jumlah kelompok BKB yang ada x 100	Laporan aset
2.2.2.1	Terdisibrusinya alat peraga/KIT untuk kelompok BKB	Jumlah BKB KIT Stunting	BKB KIT Stunting	Laporan aset
3	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka IDG	Data BPS

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.1	<i>Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;</i>	<i>Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.</i>	<i>Jumlah pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diterima dibagi jumlah data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terjadi dikali seratus persen</i>	<i>Data BPS</i>
3.1.1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);	% Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan.	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan pendampingan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dikali seratus persen	Data P2TP2A
3.1.1.1	Tersedianya Data terpilah;	Jumlah Dokumen Profil Perempuan dan Anak tersusun.	Dokumen Profil Perempuan dan Profil Anak	Dokumen Bidang PPA
3.1.1.2	Tersedianya layanan pendampingan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;	Jumlah lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.	Lembaga P2TP2A dan Forum Anak
3.1.1.3	Terlaksananya Sosialisasi Gugus Tugas Trafficking;	Jumlah siswa-siswi, masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang gugus tugas Trafficking .	Data peserta sosialisasi gugus tugas <i>trafficking</i>	Laporan Bulanan Bidang PPA
3.1.2	Terwujudnya Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak;	Jumlah PERDA Perlindungan Anak ditetapkan.	PERDA Perlindungan Anak	Dokumen Bidang PPA
3.1.2.1	Tersedianya Kajian Ranperda Perlindungan Anak;	Jumlah kajian Ranperda Perlindungan Anak tersusun.	Kajian Ranperda Perlindungan Anak	Dokumen Bidang PPA
3.1.2.2	Terlaksananya PERDA Perlindungan Anak;	Jumlah kegiatan yang mengacu pada PERDA Perlindungan Anak.	Data kegiatan PPA	Laporan Bulanan Bidang PPA
3.2	<i>Terwujudnya Peraturan Daerah terkait Pemenuhan Hak Anak;</i>	<i>Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Anak</i>	<i>Data kebijakan Pemenuhan Hak Anak</i>	<i>Dokumen Bidang PPA</i>
3.2.1	<i>Meningkatnya Penerapan Indikator Penilaian KLA di masing-masing SKPD;</i>	<i>% SKPD yang menerapkan indikator penilaian KLA .</i>	<i>Jumlah SKPD yang sudah memasukkan indikator penilaian KLA pada Prog/Keg. nya dibagi jumlah SKPD yang ada dikali seratus persen</i>	<i>Laporan Bulanan Bidang PPA</i>
3.2.1.1	<i>Terlaksananya pembinaan PATBM Desa/Kelurahan;</i>	<i>Jumlah Satgas PATBM Desa/ Kelurahan yang dibina.</i>	<i>Data peserta pembinaan PATBM</i>	<i>Laporan Bulanan Bidang PPA</i>
3.2.1.2	<i>Tersedianya Sekolah Ramah Anak</i>	<i>Jumlah Sekolah Ramah Anak.</i>	<i>Sekolah Ramah Anak</i>	<i>Kewenangan Disdikpora</i>
3.2.1.3	<i>Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak;</i>	<i>Jumlah Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak.</i>	<i>Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak</i>	<i>Kewenangan Disperkimta</i>
3.2.1.4	<i>Tersedianya Puskesmas Ramah Anak;</i>	<i>Jumlah Puskesmas Ramah Anak.</i>	<i>Puskesmas Ramah Anak</i>	<i>Kewenangan Dinkes</i>
3.2.2	<i>Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Anak;</i>	<i>Jumlah PERDA KLA ditetapkan.</i>	<i>PERDA Pemenuhan Hak Anak</i>	<i>Dokumen Bidang PPA</i>

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.2.2.1	Tersedianya Kajian Ranperda Pemenuhan Hak Anak;	Jumlah kajian PERDA KLA tersusun.	Kajian PERDA Pemenuhan Hak Anak	Dokumen Bidang PPA
3.2.2.2	Terlaksananya PERDA Pemenuhan Hak Anak;	Jumlah Kegiatan yang mengacu pada PERDA KLA.	Data kegiatan PPA	Laporan Bulanan Bidang PPA
3.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;	Persentase Usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan Perempuan.	Jumlah Usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan dibagi jumlah masyarakat pedesaan yang ada dikali seratus persen	Data BPS
3.3.1.	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Produktif;	Persentase Kelompok Perempuan Aktif dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif.	Jumlah kelompok Perempuan yang aktif dalam pelaksanaan UEP dibagi jumlah Kelompok Perempuan yang ada dikali seratus persen	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.3.1.1.	Terlaksananya pembinaan kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif;	Jumlah Kelompok Perempuan yang meningkat pemahamannya tentang bidang usaha ekonomi produktif.	Data peserta pembinaan bidang usaha ekonomi produktif.	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.3.1.2	Tersedianya akses Permodalan kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif;	Jumlah pelaku usaha yang <i>bankable</i> .	Data Nasabah/Pelaku Usaha	DP3A Provinsi, Diskop UKM, Perbankan lainnya
3.3.2.	Terwujudnya kerjasama Kelompok Perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif;	Jumlah Kerjasama kelompok Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif.	Data MOU kelompok perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Dokumen Bidang PUG
3.3.2.1.	Tersedianya kelompok Perempuan dalam bidang ekonomi Produktif;	Jumlah Home Industri Desa/Kelurahan yang melibatkan Kelompok Perempuan	Data <i>Home industry</i> Desa/Kelurahan	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.3.2.2.	Terlaksananya kerjasama pelaku usaha dalam pembinaan Usaha Ekonomi Produktif;	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kesepakatan bersama dalam pembinaan UEP.	Data MOU pelaku usaha dalam pelaksanaan pembinaan UEP	Dokumen Bidang PUG
3.4.	Meningkatnya Jejaring Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;	Persentase Jejaring Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan.	Jumlah Jejaring PUG Desa/Kelurahan yang ada dibagi jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng dikali seratus persen	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.4.1.	Terwujudnya Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas;	Persentase Jejaring Pengarusutamaan Gender yang Aktif.	Jumlah Jejaring PUG yang aktif dibagi Jumlah Jejaring PUG yang ada dikali seratus persen	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.4.1.1.	Terlaksananya pembinaan Kelembagaan gugus tugas PUG Desa/Kelurahan;	Jumlah jejaring yang meningkat pengetahuannya terhadap kelembagaan gugus tugas PUG.	Data peserta jejaring PUG Desa/Kelurahan yang mengikuti pembinaan	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.4.1.2.	Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan yang responsif gender pada SKPD;	Jumlah <i>focal point</i> yang meningkat pemahamannya tentang PPRG	Data <i>focal point</i> SKPD yang hadir dalam sosialisasi PPRG	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.4.1.3.	Tersedianya Data Gender pada instansi Pemerintah dan Swasta;	Jumlah Dokumen Statistik Gender terpilah.	Dokumen statistik gender terpilah	Dokumen Bidang PUG
3.4.2.	Terwujudnya Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender (PUG);	Jumlah PERDA PUG ditetapkan.	PERDA Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen Bidang PUG
3.4.2.1.	Tersedianya Kajian PERDA PUG;	Jumlah Kajian PERDA PUG tersusun.	Data Kajian PERDA Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen Bidang PUG

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.4.2.2.	Terlaksananya PERDA PUG;	Jumlah Kegiatan yang mengacu pada PERDA PUG.	Data Kegiatan Bidang PUG	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.5.	<i>Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Perempuan) yang Berkeadilan Gender;</i>	<i>Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta.</i>	<i>Jumlah perempuan yang bekerja di sektor Pemerintah ditambah Jumlah perempuan yang bekerja di sektor Swasta dibagi jumlah perempuan yang bekerja dikali seratus persen</i>	<i>Data BPS</i>
3.5.1.	Meningkatnya derajat Kesehatan Perempuan;	<i>Persentase</i> Kelompok Masyarakat yang melakukan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSI-B).	Jumlah kelompok perempuan di masyarakat yang mendapatkan pelatihan Gerakan sayang Ibu dan Bayi	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.5.1.1.	Terlaksananya Pembinaan GSI-B di Desa/Kelurahan;	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan GSI-B.	Data kelompok GSI-B	Laporan Bulanan Bidang PUG
3.5.1.2.	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Gizi Ibu Hamil;	Jumlah Sosialisasi peningkatan Gizi Ibu Hamil.	Data peserta sosialisasi Gizi Ibu Hamil	Kewenangan Dinkes
3.5.2.	Meningkatnya akses pelayanan Pendidikan;	<i>Persentase</i> Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Data rata-rata lama sekolah	kewenangan Disdikpora
3.5.3.	Meningkatnya derajat Ekonomi Perempuan;	<i>Persentase</i> Sumbangan Pendapatan ekonomi Perempuan	Data sumbangan pendapatan ekonomi perempuan	Data Disnaker/BPS